



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menyebutkan bahwa mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN CILACAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.

13. Lurah adalah pelaksana Pemerintah Daerah ditingkat Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
14. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
17. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
18. Pendataan adalah pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan kriteria penduduk miskin menggunakan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
19. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data dan merupakan proses pemeriksaan dan pengkajian data yang bertujuan untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
20. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu.
21. Pemutakhiran data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data.
22. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat Pernyataan dari seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan suatu kegiatan atas pengakuan kebenaran apa yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
23. Data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
24. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
25. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data elektronik yang berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
26. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation*, yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
27. Musyawarah Desa/ Kelurahan/ nama Lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa /Kelurahan /nama lain, Pemerintah Desa/ Kelurahan/ nama lain, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa /Kelurahan /nama lain untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Stakeholder terkait untuk melaksanakan Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan basis data yang valid sebagai rujukan penanganan fakir miskin dan Orang Tidak Mampu agar data penerima program valid, tepat sasaran dan tepat waktu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Mekanisme Pendataan;
2. Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

Bagian Kesatu
Mekanisme Pendataan

Pasal 4

Mekanisme Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Cilacap meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. pembentukan tim koordinasi, pendataan, verifikasi dan validasi data;
- c. pelaksanaan pendataan.

Pasal 5

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang didasarkan pada Form Pendataan dan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (2) Form sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Tim tingkat Kecamatan;
 - c. Tim tingkat Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin
dan Orang Tidak Mampu;

Pasal 7

- (1) Sasaran Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri dari:
 - a. orang yang telah masuk DTKS;
 - b. usulan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTKS, yang selanjutnya diusulkan masuk dalam DTKS sesuai kriteria yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
 - b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 - c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
 - d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 - e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
 - f. sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai /air hujan;
 - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang /minyak tanah;
 - h. hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
 - i. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
 - j. hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;
 - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik;
 - l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - m. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar;
 - n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinsos menyampaikan DTKS pengesahan terakhir kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dilakukan verifikasi awal, sekaligus Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan usulan baru;
 - b. hasil Verifikasi awal DTKS dan pengajuan usulan baru kemudian ditetapkan dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara, form Berita Acara musyawarah Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - c. hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dilakukan pencacahan oleh petugas berdasarkan Form sebagaimana terlampir;
 - d. hasil pencacahan kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh PSKS disampaikan ke Pemerintah Desa/Kelurahan untuk diterbitkan SPTJM yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat yang selanjutnya data tersebut diinput oleh operator di tingkat Desa/Kelurahan ke dalam aplikasi SIKS-NG yang tersedia;
 - e. pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan supervisi oleh Kecamatan;

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin
dan Orang Tidak Mampu;

Pasal 7

- (1) Sasaran Pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri dari:
 - a. orang yang telah masuk DTKS;
 - b. usulan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTKS, yang selanjutnya diusulkan masuk dalam DTKS sesuai kriteria yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
 - b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 - c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
 - d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 - e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
 - f. sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai /air hujan;
 - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang /minyak tanah;
 - h. hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
 - i. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
 - j. hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;
 - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik;
 - l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - m. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar;
 - n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinsos menyampaikan DTKS pengesahan terakhir kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dilakukan verifikasi awal, sekaligus Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan usulan baru;
 - b. hasil Verifikasi awal DTKS dan pengajuan usulan baru kemudian ditetapkan dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara, form Berita Acara musyawarah Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - c. hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dilakukan pencacahan oleh petugas berdasarkan Form sebagaimana terlampir;
 - d. hasil pencacahan kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh PSKS disampaikan ke Pemerintah Desa/Kelurahan untuk diterbitkan SPTJM yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat yang selanjutnya data tersebut diinput oleh operator di tingkat Desa/Kelurahan ke dalam aplikasi SIKS-NG yang tersedia;
 - e. pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan supervisi oleh Kecamatan;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **29** JAN 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **29** JAN 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR **22**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENDATAAN, VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI
KABUPATEN CILACAP



VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
TAHUN 20...

I. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN	
1. Tanggal Verifikasi	Tanggal Bulan Tahun
2. Nama Petugas Verifikasi	Kode
3. Tanggal Pemeriksaan	Tanggal Bulan Tahun Kode
4. Nama Pemeriksa	Kode
5. Hasil Verifikasi Keluarga Pemantau Manfaat : 1. Selesai di verifikasi 2. Rumah Tangga tidak dilemukan 3. Rumah Tangga pendah/bangunan sensus sudah tidak ada 4. Bagian dari rumah tangga sesuai Prefiks	No. Unit Rukoh
<p>Saya menyatakan telah melaksanakan verifikasi sesuai dengan prosedur</p> <p>Saya menyatakan telah melaksanakan pemantauan sesuai dengan prosedur</p> <p>Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemantauan</p> <p>Nama Lengkap & Tanda Tangan Responden</p>	
II. KETERANGAN PERUMAHAN	
1. Rumah tangga memilikisendiri atau negarakan sebagai berikut : a. Tersusun dari 2 SLS (Rumah Lantai Atas dan Bawah) b. Lantai atas/bawah c. A/C d. Perumahan atau Apartemen (Rumah) e. Toko f. Teras g. Ruang tamu dan kamar tidur h. 10 kamar tidur	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
2. Rumah tangga memilikisendiri atau negarakan sebagai berikut : a. Saya b. Kerabat c. Hoster	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
3. Jumlah rumah yang dimiliki (color)	1. Ya 2. Tidak
4. a. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? b. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? c. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? d. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
5. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 6. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 7. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 8. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
9. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 10. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 11. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 12. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
13. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 14. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 15. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 16. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
17. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 18. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 19. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 20. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
21. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 22. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 23. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 24. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
25. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 26. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 27. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 28. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
29. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 30. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 31. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 32. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
33. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 34. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 35. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 36. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
37. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 38. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 39. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 40. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
41. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 42. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 43. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 44. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
45. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 46. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 47. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 48. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
49. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 50. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 51. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 52. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
53. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 54. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 55. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 56. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
57. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 58. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 59. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 60. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
61. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 62. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 63. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 64. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
65. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 66. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 67. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 68. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
69. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 70. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 71. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 72. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
73. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 74. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 75. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 76. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
77. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 78. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 79. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 80. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
81. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 82. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 83. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 84. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
85. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 86. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 87. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 88. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
89. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 90. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 91. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 92. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
93. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 94. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 95. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 96. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>
97. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 98. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 99. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran? 100. Apakah ada A/C yang memiliki nomor pendaftaran?	<p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p> <p>1. Ya 2. Tidak</p> <p>3. Ya 4. Tidak</p>

I. PENGENALAN TEMPAT	
1. Provinsi	6. Alamat
2. Kabupaten/Kota	7. Nomor jalan rumah tangga (atau Poskod)
3. Kecamatan	8. Nama RT
4. Desa/Kelurahan/Negeri	9. Jumlah ART
5. Nama SLS	10. Jumlah Keluarga
a. K001	f. K006
b. K002	g. K007
c. K003	h. K008
d. K004	i. K009
e. K005	j. K010
11. No. KK setiap keluarga di dalam Rumah Tangga	

II. KETERANGAN PERUMAHAN	
1a. Apakah ada bangunan tempat tinggal permanen?	1. Tidak ada 2. Ada
1b. Apakah ada bangunan tempat tinggal sementara?	1. Tidak ada 2. Ada
2. Luas lantai	01. 0-10 m ² 02. 10-20 m ² 03. 20-30 m ² 04. 30-40 m ² 05. 40-50 m ² 06. 50-60 m ² 07. 60-70 m ² 08. 70-80 m ² 09. 80-90 m ² 10. Lebih dari 90 m ²
3. Jenis lantai/lubuk	01. Marmer 02. Paving/keramik 03. Lantai kayu 04. Lantai beton 05. Lantai tanah 06. Lantai lainnya
4a. Jaminan dengan tanah	1. Tidak ada 2. Ada
4b. Jaminan dengan surat	1. Tidak ada 2. Ada
5a. Jaminan dengan surat	1. Tidak ada 2. Ada
5b. Jaminan dengan surat	1. Tidak ada 2. Ada
6. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
7a. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
7b. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
8. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
9. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
10. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
11. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
12. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
13. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
14. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
15. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
16. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
17. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
18. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
19. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
20. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
21. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
22. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
23. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
24. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
25. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
26. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
27. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
28. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
29. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
30. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
31. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
32. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
33. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
34. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
35. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
36. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
37. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
38. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
39. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
40. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
41. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
42. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
43. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
44. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
45. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
46. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
47. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
48. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
49. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
50. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
51. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
52. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
53. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
54. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
55. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
56. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
57. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
58. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
59. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
60. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
61. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
62. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
63. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
64. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
65. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
66. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
67. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
68. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
69. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
70. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
71. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
72. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
73. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
74. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
75. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
76. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
77. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
78. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
79. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
80. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
81. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
82. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
83. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
84. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
85. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
86. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
87. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
88. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
89. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
90. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
91. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
92. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
93. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
94. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
95. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
96. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
97. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
98. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
99. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada
100. Apakah ada bangunan lain?	1. Tidak ada 2. Ada

**FORM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL TAHUN 20..**

MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun , telah dilakukan kegiatan forum Musyawarah di wilayah :

Provinsi :
Kabupaten/Kota* :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan* :
Nama Lokasi :

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diatas, bahwa pada wilayah tersebut telah disepakati hasil pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai berikut:

1. 1. Keberadaan dan Status Data Prelist
 - a. Jumlah Rumah Tangga Ditemukan : Rumah Tangga
 - b. Jumlah Rumah Tangga Tidak Ditemukan : Rumah Tangga
- Total Rumah Tangga Prelist : Rumah Tangga**
2. Jumlah Rumah Tangga Usulan Baru : Rumah Tangga

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

CILACAP,20..

KEPALA DESA / LURAH

PETUGAS

(.....)
Nama dan tanda tangan

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Lampiran:

- Daftar Hadir
- Rekapitulasi Data Prelist Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial Hasil Konsultasi Publik

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI